

KE- PPP -

AN



Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan
2013



*Kembali ke
Rumah Besar
Umat Islam*

DR. H. SURYADHARMA ALI, M.Si
Ketua Umum

Ir. H.M. ROMAHRMUZIY, MT
Sekretaris Jenderal

SAMBUTAN DPP PPP



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Muktamar VII PPP tahun 2011 dan Mukernas I Partai Persatuan Pembangunan tahun 2012 telah menghasilkan beberapa ketetapan dan keputusan antara lain memberi amanat kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2011-2015 untuk menyukseskan dan memenangkan Pemilu 2014.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, DPP PPP menerbitkan buku pedoman persiapan Pemilu 2014 antara lain:

1. Ke – PPP – an
2. Strategi Pemenangan Pemilu 2014
3. Strategi Pemenangan Caleg pada Pemilu 2014
4. Pengamanan suara di TPS
5. Panduan Peraturan Pemilu 2014
6. 101 “Tokoh” yang Bikin Lucu Pemilu 2014
7. Mati Kreatif ala PPP

Kepada fungsionaris partai mulai tingkatan DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting serta kader dan Caleg Partai Persatuan Pembangunan di seluruh Indonesia agar mempelajari, memahami dan melaksanakan hal-hal yang tertuang di dalam buku pedoman ini dengan sungguh-sungguh, demi tercapainya perjuangan menyukkseskan dan memenangkan PPP pada Pemilu Legislatif 2014 yang akan datang. Seluruh materi di dalam buku ini juga tersedia dalam format soft copy di laman DPP PPP yang beralamat di <http://www.ppp.or.id> menu *download*.

Sebagai karya manusia, pastilah tak ada gading yang tak retak, karenanya permohonan maaf terlebih dahulu disampaikan atas adanya ketidaksempurnaan dalam penyusunan buku ini.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Juni 2013

DPP Partai Persatuan Pembangunan

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

(DR. H. Suryadharma Ali M.Si.)

(Ir. H. M. Romahurmuziy, MT)

PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah DPP Partai Persatuan Pembangunan dapat menyelesaikan sebuah Buku Ke-PPP-an, salah satu dari buku materi yang wajib diketahui oleh para fungsionaris partai, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.

Seorang caleg harus memperoleh mandat partai untuk dapat berkompetisi menjadi Anggota DPR atau DPRD di daerah pemilihannya. Sebagai caleg ia harus memahami sejarah perjuangan, visi dan misi serta cita-cita politik PPP. Dengan demikian Caleg PPP akan dapat membedakan secara ideologis dan program PPP dengan partai lainnya, baik partai politik yang berbasis nasionalis maupun yang bernuansa keagamaan.

Secara historis PPP dilahirkan dan dideklarasikan oleh tokoh-tokoh politik Islam; KH Dr. Idham Chalid (Partai Nahdlatul Ulama), H.M.S. Mintaredja, SH (Partai Muslimin Indonesia), H. Anwar Tjokroaminoto (Partai Syarikat Islam Indonesia), H. Rusli Halil (Partai Islam PERTI) dan KH Masykur (Nahdlatul Ulama / Fraksi PPP), pada tanggal 5 Januari 1973. Kehadiran PPP menandai restrukturisasi politik pada awal Orde Baru, dan menjadi peserta Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 bersama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya. Pada era reformasi Pemilu 1999, 2004, dan 2009, di tengah sistem multi partai dan banyaknya partai-partai Islam dan berbasis Islam, PPP masih eksis di tengah pergolakan dan dinamika politik nasional.

Memasuki persiapan pemilu 2014, PPP menargetkan 12 juta kader yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kesiapan infratrukur partai mulai dari tingkat pusat hingga di ranting, kini strategi kemenangan pemilu berbasis daerah pemilihan dengan konsentrasi merebut suara di TPS menjadi prioritas program DPP, DPW dan DPC PPP.

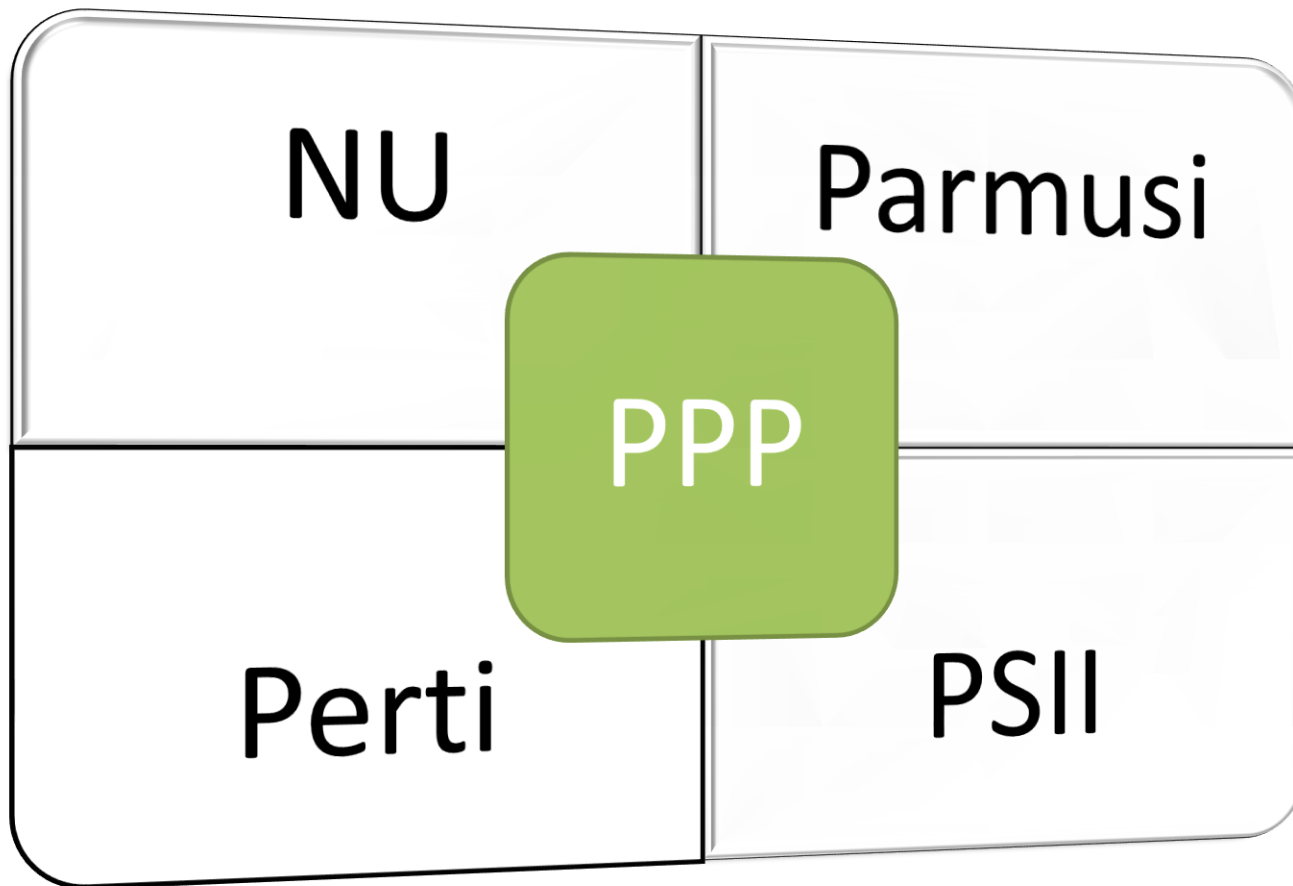
Melalui tema kampanye yang dirumuskan dalam sikap politik PPP, seperti bidang kehidupan beragama, politik, ekonomi, hukum, dan kesejahteraan rakyat, yang merupakan ringkasan dari Khitthoh dan Program Perjuangan PPP, akan menjadi panduan para Caleg DPR dan DPRD. Di samping itu para caleg agar merumuskan tema kampanye yang bersifat lokal sesuai dengan kebutuhan daerah pemilihannya.

Materi yang terdapat dalam buku pedoman ini dapat dijadikan bahan kampanye partai dan caleg, bisa ditulis di media kampanye seperti baliho, pamflet, stiker, brosur, dan kalender.

Jakarta, Juni 2013

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan

FUSI PPP



LATAR HISTORIS

1. Fusi merupakan kesepakatan partai-partai politik Islam untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita politik dalam satu gerak dan langkah melalui satu wadah PPP, yang ditandatangani pada 5 Januari 1973, oleh para deklaratore : KH Idham Chalid (NU), HMS Mintaredja (Parmusi), H. Anwar Tjokroaminoto (PSII), H. Rusli Halil dan KH Masykur (NU).
2. PPP telah memiliki legitimasi politik, dengan berpengalaman sebagai peserta Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2009. Telah memiliki kepemimpinan dan struktur organisasi yang kuat dari DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting, serta basis konsituen yang mapan dan solid.
3. PPP harus menjadi partai terbuka bagi seluruh umat Islam dan merebut dukungan politik dari ormas, pondok pesantren, dan umat Islam secara keseluruhan.

JATI DIRI PPP

Partai Persatuan Pembangunan yang disingkat PPP adalah partai politik dengan jati diri Islam yang merupakan hasil fusi politik Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Islam Tarbiyah Islamiyah, sebagai penerus estafet perjuangan politik umat Islam, berakhlakul karimah, berwawasan ke-Indonesiaan, berorientasi keummatan dalam mewujudkan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin yang diridhai Allah SWT (Baladun Thoyyibatun wa Rabbun ghofur) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.



Foto : facebook.com

PPP RUMAH BESAR UMAT ISLAM

PPP tempat umat Islam menyatukan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya.

PPP tempat umat Islam bernaung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

PPP tempat umat Islam merapatkan barisan

PPP wadah pengkaderan untuk melahirkan pemimpin nasional

PPP menjadi partai pemersatu untuk semua kelompok

Pemilu 2014, berjuang bersama membesarkan PPP sebagai Rumah Besar Umat

MAKNA LAMBANG KA'BAH



- Lambang Ka'bah adalah simbol pemersatu umat Islam.
- Lambang Ka'bah adalah simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam yang merupakan hasil istikharah ulama

VISI PPP

- “Terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.”
- “PPP menjadikan Islam dan Keindonesiaan merupakan satu kesatuan, yang menjunjung tinggi rahmatan lil alamin sebagai landasan perjuangannya. Oleh karena itu PPP mengembangkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, memperkuat persatuan dalam bingkai ukhuwah wathoniyah, dan memperhatikan nilai –nilai universal dan hak-hak kemanusiaan sebagai persaudaraan dan ukhuwah insaniyah”

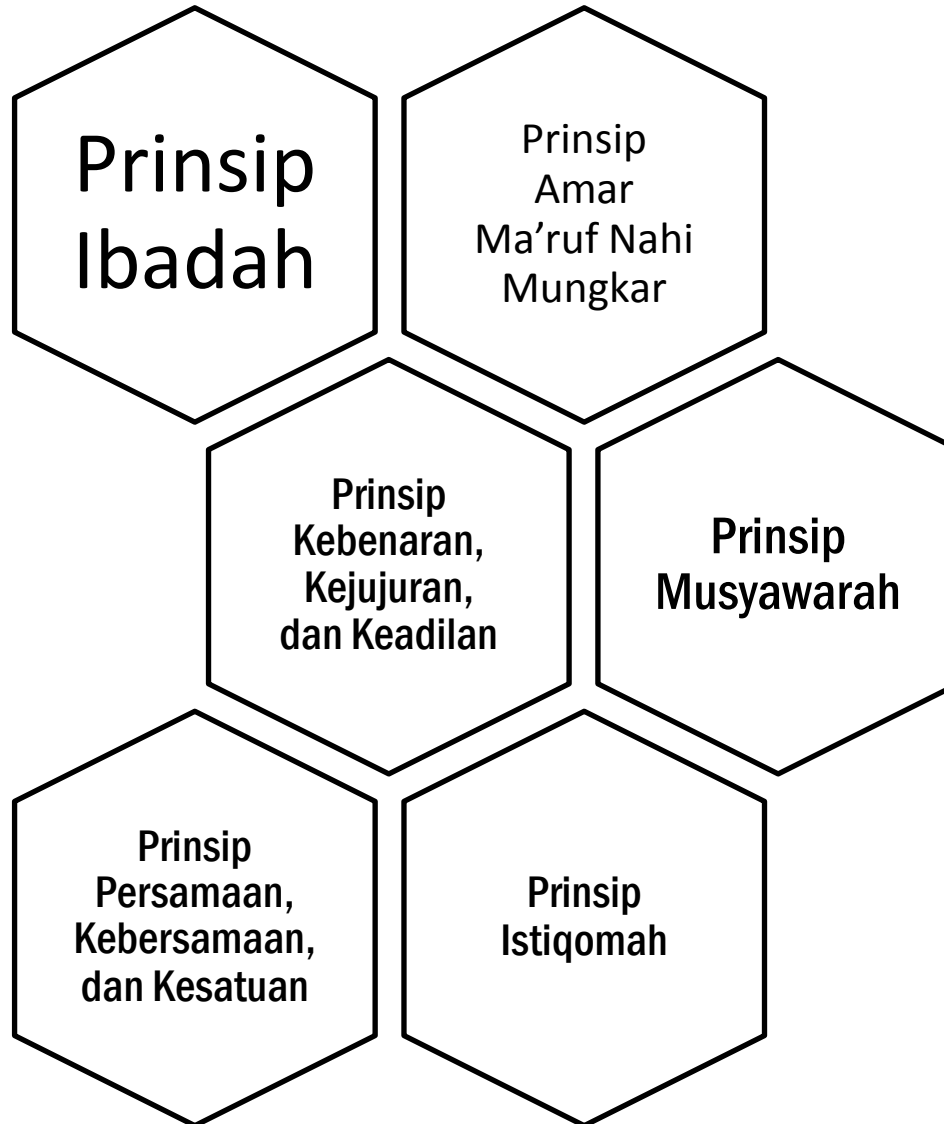
MAHA BESAR UMAT ISLAM

PERKHIDMAT MELAYANI UMAT

atukembar - Bogor 17 - 19 April 20



6 PRINSIP PERJUANGAN



- **Prinsip Ibadah:** Berupaya mendasari perjuangannya dengan prinsip ibadah yang seluas-luasnya, untuk mencapai keridhoan Allah SWT, sehingga seluruh kegiatan berpolitik merupakan keterpanggilan untuk beribadah;
- **Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar:** Berusaha menumbuhkan keberanian dalam menegakkan kebenaran dalam kehidupan masyarakat, dan menentang pembusukan politik (political decay) yang mengakibatkan kemungkaran yang lebih dalam;
- **Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan:** Berupaya sungguh-sungguh agar senantiasa berpihak pada kebenaran melawan kebathilan. Kejujuran untuk mengemban amanah rakyat, dan Keadilan untuk menghilangkan kedzaliman dan diskriminasi.

- **Prinsip Musyawarah:** Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai, dan menumbuhkan tanggungjawab bersama.;
- **Prinsip Persamaan, Kebersamaan, dan Persatuan:** Dengan prinsip ini, diharapkan akan terwujud sikap egaliter, kebersamaan, dan terhindar dari bahaya dis-integrasi, dan perpecahan;
- **Prinsip Istiqomah:** Sikap konsisten mewajibkan kader-kader Partai agar bersikap gigih, kokoh, teguh pendirian, dan selalu konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan nilai-nilai kebenaran, dan keadilan.

5 KHIDMAT PERJUANGAN

1. Membina dan membangun manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah.
2. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia, sesuai dengan martabatnya, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah.
3. Memelihara rasa aman, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mengembangkan ukhuwah wathoniyah.
4. Membangun kehidupan politik yang demokratis dan kedaulatan rakyat.
5. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, mencegah kesenjangan sosial dan ekonomi.

AGENDA PERJUANGAN

1. KEHIDUPAN BERAGAMA
2. POLITIK
3. OTONOMI DAERAH
4. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
5. HUKUM DAN HAM
6. KESEJAHTERAAN RAKYAT
7. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8. KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
9. PERTANIAN
10. PERIKANAN
11. HUBUNGAN INTERNASIONAL
12. ISLAM DAN KENEGARAAN
13. TNI DAN POLRI

KEHIDUPAN BERAGAMA

1. Melaksanakan Amar ma'ruf nahi munkar untuk senantiasa memelihara ajaran Islam yang tegak dan sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits;
2. Mengembangkan kehidupan beragama yang toleran sesuai dengan prinsip Islam *rahmatan lil 'alamin*;
3. Mendorong kehidupan beragama yang melahirkan manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlakul karimah dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa;
4. Menjadikan kehidupan beragama yang cerdas dan harmonis sebagai sumber moralitas memajukan kehidupan bangsa.



POLITIK

1. Penguatan kelembagaan partai politik sebagai pilar demokrasi, dalam sistem multi partai sederhana dengan mengembangkan partai politik yang sehat, dinamis dan demokratis untuk melaksanakan fungsi-fungsi partai politik.
2. Pengembangan demokratisasi agar dikelola dengan baik, sehingga tidak terjadi liberalisasi politik untuk mencegah disintegrasi bangsa, dan mengakibatkan kerusakan moral dan nilai-nilai agama serta kearifan lokal.
3. Pemilihan umum secara langsung yang transparan dan demokratis merupakan pendidikan politik rakyat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, agar tidak disalahgunakan sebagai ajang perebutan kekuasaan semata, tetapi harus berorientasi untuk kesejahteraan rakyat.

PEMBUKAAN MUKTAMAR VII
TAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Oleh



11

OTONOMI DAERAH

1. Otonomi daerah yang luas dan berbasis pada pemerintahan kabupaten/kota, harus ditingkatkan melalui kebijakan desentralisasi yang memadai, dan mendorong kemandirian daerah dalam mengelola sumberdaya alam yang ditunjang oleh sumber daya manusia berkualitas;
2. Otonomi Khusus bagi NAD dan Papua harus menjadi prioritas utama pemerintah pusat dalam pengembangan demokratisasi, pembangunan ekonomi dan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan pemerataan ekonomi khususnya dikawasan Indonesia Bagian Timur harus menjadi prioritas utama pembangunan nasional.



EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

1. Memperjuangkan anggaran pembangunan untuk lapisan masyarakat paling bawah dan daerah tertinggal demi keadilan sosial, serta subsidi yang terarah dan tepat sasaran;
2. Membangun perekonomian yang sehat dan efisien untuk menciptakan daya saing yang kuat di arena internasional;
3. Menciptakan Kebijakan afirmatif untuk mengembangkan ekonomi mikro, usaha kecil dan menengah, koperasi dan sektor informal.



Foto : dinamikapp.blogspot.com

HUKUM DAN HAM

1. Memperkuat kelembagaan penegakan hukum, terutama Kepolisian dan Kejaksaan, serta memperjuangkan agar KPK dapat menjadi bagian dalam UUD 1945;
2. Memperjuangkan keadilan substansial, antara lain dengan mempercepat perubahan KUHP dan KUHPA sesuai dengan perkembangan masyarakat;
3. Meningkatkan dan memperkuat posisi Komnas HAM agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan dan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.

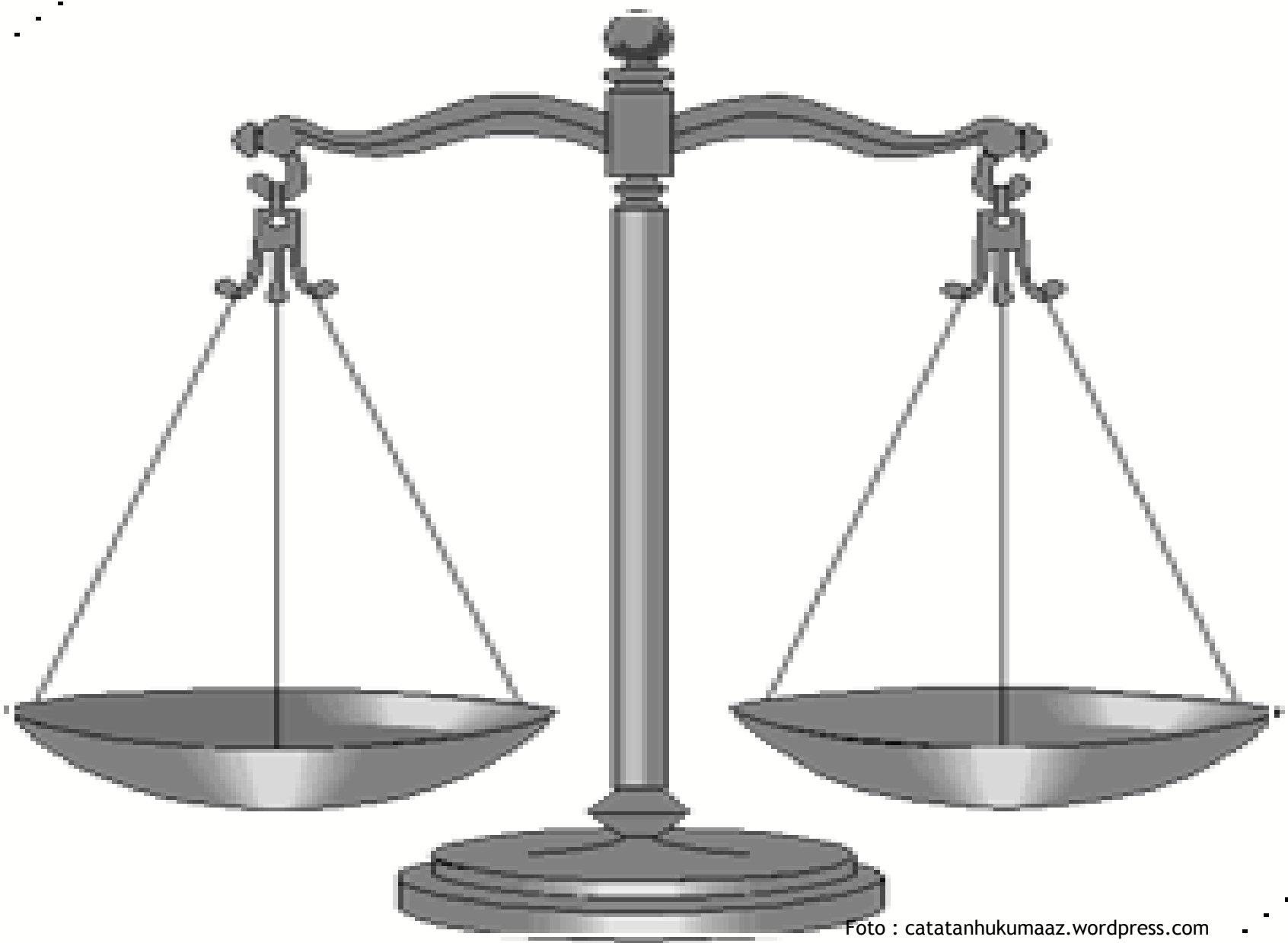


Foto : catatanhukumaaz.wordpress.com

KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Pembangunan harus diarahkan untuk lapisan masyarakat paling miskin dan daerah paling tertinggal demi mewujudkan keadilan sosial;
2. Revitalisasi pasar-pasar tradisional untuk mengembangkan produksi rakyat agar tidak terkontaminasi dengan pasar modern, dan super market sebagai bagian dari ekonomi kapitalis;
3. Memperjuangkan kebijakan subsidi bidang sandang, perumahan, dan pangan yang tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat miskin dan daerah tertinggal.

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Meningkatkan mutu dan kualitas lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat, seperti madrasah dan pesantren, sebagai ujung tombak mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Meningkatkan kualitas SDM sebagai pondasi kemajuan bangsa dan negara dengan mengupayakan Pendidikan gratis dari PAUD sampai SMA , dan Bea Siswa bagi yang berprestasi untuk menyelesaikan pendidikan Perguruan Tinggi;
3. Memberikan perlindungan semaksimal mungkin untuk menjaga eksistensi kebudayaan dan pelaku seni lokal agar masyarakat tidak kehilangan akar pada kearifan lokal. Serta memperjuangkan pengaturan program televisi yang lebih mendidik serta dapat menggerakkan seluruh energi anak bangsa yang cerdas, maju dan berkarakter.

KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

1. Mengembangkan karakter bangsa yang berbasis akhlak mulia di kalangan pemuda untuk mempersiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa;
2. Merevitalisasi organisasi kepemudaan sebagai media untuk meningkatkan profesionalisme dan daya juang pemuda untuk menghadapi masa depan;
3. Mengembangkan kewiraswastaan pemuda sebagai basis pengembangan pemuda yang tangguh dan mandiri;
4. Membangun organisasi dan cabang-cabang olahraga yang profesional sesuai dengan potensi daerah dan terhindarkan dari kepentingan politik.



PERTANIAN

1. Memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan, sebagai pijakan kedaulatan dan kemandirian bangsa;
2. Merealisasikan pembagian lahan untuk rakyat (reformasi agraria) sebagai upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
3. Mengupayakan pengendalian harga produk pertanian/peternakan yang rasional dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

PERIKANAN

1. Mengintensifkan perwujudan budaya maritim yang menjunjung tinggi kolektivitas, rasionalitas, dan agresivitas sebagai budaya bangsa;
2. Memperkuat posisi ekonomi sebagai negara maritim dan menjadikannya sebagai salah satu sumber perekonomian nasional;
3. Memperketat pengawasan laut agar kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat;
4. Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di pesisir sebagai basis pengembangan ekonomi nasional.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

1. Memperjuangkan kesetaraan posisi bangsa-bangsa di PBB sesuai dengan prinsip kesamaan hak dan kewajiban;
2. Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina sehingga menjadi bangsa yang merdeka dan berkedaulatan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kepesertaan Indonesia untuk perdamaian internasional, terutama di negara-negara Timur Tengah dan Afrika;
4. Menyelesaikan persoalan perbatasan dengan negara tetangga secara permanen dan bermartabat;

ISLAM & KENEGARAAN

1. Hubungan Agama (Islam) dan Negara bersifat simbiotik, yaitu saling membutuhkan, melindungi dan memelihara. Agama memerlukan Negara, agar ia dapat berkembang dengan baik dan berfungsi secara sempurna. Begitu sebaliknya Negara memerlukan agama, agar Negara menjadi Negara yang berkeadaban.
2. PPP tidak menganut paham integralistik, yang men-subordinasikan kepentingan Negara atas agama dan sebaliknya memaksakan kepentingan agama atas negara, demikian juga pola hubungan yang sekularistik, yang memisahkan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



TNI DAN POLRI

1. Kehadiran Tentara Nasional Indonesia, merupakan keharusan sejarah sesuai dengan cita-cita dan semangat perjuangan serta nilai-nilai Proklamasi 17 Agustus 1945, oleh karena itu TNI adalah lahir, menjadi milik rakyat, dan berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara, mengawal keutuhan NKRI, dengan semangat profesionalisme yang tinggi dan semangat juang yang tangguh, sehingga terhindar dari pengaruh kekuasaan, partai politik dan kelompok manapun;
2. Profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sangat diharapkan agar bekerja sepenuh hati sebagai pengayom masyarakat, dan aparat penegak hukum, yang bercirikan tanggap dan cerdas dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, terorisme, tindakan kriminal, dan penyalahgunaan narkoba serta kekerasan yang lain;

3. Pengawasan pelaksanaan HAM di kalangan TNI/Polri perlu diperketat, agar tidak terjadi pelanggaran HAM oleh aparatus Negara;
4. Densus 88 sedikit banyak telah melukai perasaan umat Islam dan justru memicu kebencian sebagian kalangan umat Islam terhadap Polri, lalu terhadap negara. Untuk itu, pemberantasan terorisme di Polri perlu dikembalikan lagi pada satuan organik yang ada sekaligus membubarkan Densus 88 secara bertahap.



PPP & KEKUASAAN

Makna Kekuasaan

Kekuasaan adalah amanah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan, melindungi dan menciptakan rasa aman sebagai implementasi dari Rahmatan lil 'alamin. Maka kekuasaan harus dibimbing oleh Agama, agar terhindar dari penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan kekuasaan harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan juga kepada Allah SWT.

Maka kekuasaan tidak boleh diraih dengan cara-cara yang tidak benar, mencederai dan merusak keluhuran makna kekuasaan itu sendiri. Apalagi kekuasaan yg diperoleh dengan cara “money-politic” atau yang lazim dilakukan dengan politik-transaksional, pada hakekatnya kekuasaan tersebut telah fasid atau rusak, tercederai legitimasinya.



Orientasi Politik

Sebagai Parpol, PPP harus berorientasi meraih, merebut dan mempertahankan kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, mencerdaskan bangsa, memelihara kesatuan dan keutuhan NKRI melalui kekuasaan PPP dapat berkhidmat sesuai dengan prinsip perjuangan partai.

“Orientasi kepada kekuasaan agar memperoleh kepercayaan umat untuk memperbanyak anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/ Kota, dan menguasai pemerintah di pusat dan daerah.



Orientasi Perjuangan

Orientasi perjuangan politik PPP adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan berahlaqul-karimah, serta bangsa dan Negara yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, yang diridhoi Allah SWT, sebagai *Baldatun thoyyibatun wa Rabbun ghofur*



TANTANGAN INTERNAL

1. Pengurus PPP dari Pusat sampai Ranting yang berjumlah 1,6 juta orang belum sepenuhnya aktif. Pengurus PPP hanya aktif menjelang Pemilu atau Pemilukada. Seharusnya kader PPP berperan aktif sepanjang waktu, berkhidmat untuk membesarkan partai:
2. Kader ideologis PPP semakin lama semakin berkurang. Banyak kader yang kurang memiliki militansi, semangat juang yang tangguh dan profesional.

TANTANGAN EKSTERNAL

1. Perubahan Pemilih Ideologis ke arah pragmatis, dan materialistis akibat perubahan dari sistem politik tertutup menjadi sistem politik terbuka dan demokratis;
2. Perubahan sistem Pemilu, dari sistem proporsional tertutup, ke sistem proporsional terbuka berbasis daerah pemilihan dan menggunakan suara terbanyak;
3. Perubahan kultur masyarakat yang semakin dinamis, cerdas, dan kritis, terhadap perilaku elite Partai Politik, dan Pejabat Publik.

EMPAT AGENDA STRATEGIS

1. REVITALISASI IDEOLOGI
2. REVITALISASI ORGANISASI
3. KADERISASI BERBASIS DAPIL
4. REALISASI PROGRAM STRATEGIS

I. Revitalisasi Ideologi

1. Revitalisasi ideologi, atau penguatan ideologi Partai dimaksudkan untuk lebih meneguhkan jatidiri partai, identitas, dan karakteristik PPP sebagai Partai Islam;
2. Penguatan ideologi harus terus di-internalisasikan pada setiap warga PPP khususnya para kader dan pemimpin Partai, sehingga performance PPP nampak jelas sebagai Partai Islam, yang terjaga moralitasnya, dengan cirinya yang *santun dalam sikap politik, moderat dalam sikap sosial, dan kukuh dalam menjalankan nilai-nilai syariat Islam*;
3. Revitalisasi ideologi diwujudkan dari konsistensi dan kemampuan menjaga ideologi islam, serta meng-aktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MAHA BESAR UMAT ISLAM

BERKHIDMAT MELAYANI UMAT

Batu Pahat - Bogor 17 April 2012



II. Revitalisasi Organisasi

1. Revitalisasi organisasi dari tingkat pusat sampai tingkat ranting atau anak ranting, sehingga PPP mempunyai akar yang kuat untuk mensosialisasi visi dan misinya;
2. Penguatan kelembagaan partai secara fungsional DPP, DPW, DPC, PAC, Pengurus Ranting agar menjalankan mekanisme organisasi secara tertib dan benar, sesuai AD/ART. Struktur Partai dibantu oleh organisasi sayap sesuai dengan bidang konstituennya seperti WPP, GPK, GMPI dan AMK, harus dimaksimalkan untuk penguatan institusi PPP, dan meraih suara pada setiap Pemilu;
3. Kaderisasi PPP harus dilakukan secara terjenjang dan berbasis daerah pemilihan, serta dilakukan secara terus menerus sepanjang waktu, bukan hanya menjelang Pemilu diperlukan lembaga yang secara khusus dan terus menerus melakukan kaderisasi.



III. KADERISASI BERBASIS DAPIL

1. Kaderisasi berbasis Dapil adalah sekolah politik yang berfungsi sebagai sarana untuk sosialisasi nilai-nilai dan internalisasi ideologi politik dalam rangka kemenangan PPP
2. Kaderisasi berbasis Dapil merupakan salah satu media rekrutmen politik untuk mengisi kebutuhan internal parpol, baik sebagai manajer organisasi, calon pemimpin, kader profesional, calon anggota DPR/DPRD, calon Kepala Daerah, dan kader penggerak kemenangan PPP di TPS.
3. Kaderisasi berbasis Dapil dimaksudkan untuk keberlangsungan masa depan partai, sesuai dinamika dan perubahan politik nasional dalam sistem Pemilu yang kompetitif dan demokratis.



DPP PPP

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
RUMAH BESAR UMAT ISLAM
BERKHIDMAT MELAYANI UMAT



HARMA ALI
m DPP PPP

Batambar ... Bog ... 19 Apr ... 2



IV. Realisasi Program Strategis

1. Ideologi Partai diwujudkan dalam bentuk platform partai, visi dan misi partai, dan program-program perjuangan partai;
2. Salah satu program strategis yang harus dioperasionalkan adalah *membangun dan memperluas jaringan politik*, antara lain dengan menembus kelompok-kelompok profesi, dengan menjadikan *silaturrahmi* sebagai model gerakan;
3. Program strategis *membangun jaringan ekonomi*, dengan salah satu langkahnya adalah memfasilitasi para pelaku ekonomi kecil, menengah dan koperasi, dalam mengakses untuk kemudahan dan pengembangan potensi ekonominya;
4. Program strategis *advokasi masyarakat*, dengan salah satu langkahnya adalah memberikan bantuan, pembelaan, perlindungan dan pendampingan kepada masyarakat agar memperoleh keadilan dan hak politiknya;

5. Reintegrasi umat, untuk menghimpun umat Islam dalam satu wadah partai politik, yaitu Rumah Besar Umat Islam dengan membangun silaturahmi dan komunikasi intensif di kalangan ormas Islam dalam rangka penyamaan persepsi, visi, dan misi yang akan diusung bersama;
6. Membangun koalisi partai politik Islam untuk membentuk kepemimpinan nasional yang solid, amanah, dan mengakar untuk menjamin perwujudan kedaulatan rakyat.

PENUTUP

Pemilu 2014 tonggak kebangkitan & Kejayaan umat Islam bersama PPP.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan bagi orang-orang yang berjuang untuk(mencari keridhoan) Kami, sesungguhnya Kami akan memberi petunjuk kepada mereka pada jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan'

(Q.S. 29 / Al Ankabut : 69).

Selamat Berjuang & Beribadah